

EVALUASI KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO DALAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR

Abdul Aziz Maulana, Asal Wahyuni Erlin Mulyadi

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret
email: azizedensor_27@student.uns.ac.id

Abstrak

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di kota/kabupaten merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang bertanggung jawab terhadap manajemen pelayanan pendidikan di daerah. Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu Kabupaten yang masih menghadapi beberapa permasalahan pelayanan Pendidikan seperti pengurangan jumlah sekolah karena adanya penggabungan sekolah, kurangnya sarana prasarana pembelajaran, dan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang belum berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo sebagai evaluasi terhadap manajemen pelayanan Pendidikan Dasar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara kepada informan yang dipilih secara *purposive* (informan yang mengetahui hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian) dan studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen terkait Pendidikan dasar. Validitas data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber dan teknis analisis data interkatif yang meliputi reduksi, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dalam manajemen pelayanan pendidikan dasar pada indikator responsibilitas organisasi ditunjukkan dengan pelaksanaan kegiatan dan pemberian layanan yang sesuai dengan prinsip administrasi dan kebijakan organisasi, serta telah diterapkan sesuai dengan standar profesionalisme. Pada indikator responsivitas, kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dalam manajemen pelayanan pendidikan dasar ditunjukkan dengan upaya dalam melakukan pencarian kebutuhan pelayanan SMP dan SD, dan mampu untuk menyusun agenda prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan publik. Dalam pemenuhan pengembangan program, perlu memperhatikan hasil asesmen nasional terkait kemampuan sekolah dalam aspek literasi dan numerasi. Kinerja dari indikator akuntabilitas ditunjukkan dari keberpihakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo pada kepentingan masyarakat serta pemenuhan kewajiban memberikan pertanggung jawaban organisasi kepada pihak terkait termasuk kepada masyarakat. Dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten sukoharjo di bidang sd dan smp supaya meningkatkan prioritas pelayanan dan pengembangan program layanan publik kepada sekolah-sekolah di jenjang pendidikan dasar yang mendapatkan penilaian buruk saat assesment nasional. Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupeten Sukoharjo dapat melakukan monitoring kepada sekolah-sekolah tanpa perlu menunggu pertemuan rutin atau keluhan muncul. Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dapat mengadakan pelatihan rutin bagi para pegawai tanpa menunggu adanya perubahan seperti berubahnya kurikulum.

Kata Kunci: evaluasi kinerja; manajemen pelayanan; pendidikan dasar

Abstract

The City/District Education and Culture Office is a Regional Technical Implementation Unit (Unit Pelaksanaan Teknis Daerah/UPTD) that is responsible for the management of education services in the region. Sukoharjo Regency is among the regencies that experienced several problems in education services such as the reduction in the number of schools due to school mergers, lack of learning facilities and infrastructure, and unsucced of the implementation of school-based management (Manajemen Berbasis Sekolah/MBS). This study aims to determine and explain the performance of the Sukoharjo Regency Education and Culture Office as an evaluation of the management of basic education services. This study is a qualitative descriptive performing data collection techniques using interviews to the purposively selected informants (informants who know things related to research problems) and documentation studies of the documents related to basic education services. Data validity is carried out using source triangulation, while data analysis was performed using interactive data analysis techniques including dta reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study shows that the performance of the Sukoharjo Regency Education and Culture Office in managing basic education services on the organizational responsibility indicator is indicated by the implementation of activities and provision of services in accordance with the principles of administration and organizational policies, and has been implemented in accordance with professionalism standards. On the responsiveness indicator, the performance of the Sukoharjo Regency Education and Culture Office in managing basic education services is indicated by the efforts to search for junior high and elementary school service needs, and is able to compile priority service agendas, and develop public service programs. In fulfilling program development, it is necessary to pay attention to the results of national assessments related to school capabilities in literacy and numeracy aspects. The performance of the accountability indicator is indicated by the Sukoharjo Regency Education and Culture Office's commitment to the interests of the community and the fulfillment of the obligation to provide organizational accountability to related parties including the community. Sukoharjo Regency Education and Culture in SD and SMP Sector need to improve service priority and public service program development at schools that has bad evaluation on national assessment. Sukoharjo Regency Education and Culture can monitor schools without to wait routine meet or complaint appearing. Sukoharjo Regency Education and Culture can make routine training for employees without to wait change for example curriculum changing.

Keywords: *Service management, basic education, performance evaluation*

Pendahuluan

Pembangunan SDM memiliki urgensi penting seperti yang disampaikan Sugiarto, E.C (2019) bahwa pembangunan SDM berperan sebagai faktor kunci untuk Indonesia bisa mengatasi persaingan-persaingan global. Menurut Almaushofia, N (2023) dalam memposisikan pendidikan haruslah meletakannya ke dalam posisi inti dari pembangunan manusia. Suatu pembangunan baiknya bersifat *homosentris*, hal ini dapat diawali dari pendidikan. Dengan adanya pendidikan, akan dapat mengilhami terciptanya solusi-solusi baru dalam rangka untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terdapat di msyarakat.

Berdasarkan peraturan UU Nomor 20 tahun 2003 yang berisi tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa masing-masing warga negara memiliki hak yang sama dalam mendapatkan Pendidikan bermutu. Maka dari itu

pemerintah memiliki tanggung jawab berupa menyediakan pendidikan yang mudah diakses dan memiliki kualitas yang baik. Pemerintah pusat menyerahkan tanggung jawab urusan tata kelola pemerintahan secara mandiri pada tiap tiap pemerintah daerah. Dengan kata lain, tatanan pemerintahan yang kita gunakan sudah bergeser dari sistem sentralisasi ke desentralisasi, kita menyebutnya sebagai otonomi daerah.

Pemerintah daerah dalam menyangkut urusan pendidikan, melalui dinas pendidikan memiliki peran yang penting di dalam setiap kebijakan yang di atur, yang mana memiliki dampak pada pelayanan pendidikan di daerahnya. Misalnya kebijakan itu berupa kebijakan inovasi pendidikan di provinsi jawa barat. Dinas pendidikan disana mengangkat kebijakan dengan nama pendidikan juara. Kebijakan itu untuk muncul sebagai reaksi atas isu-isu permasalahan yang muncul seperti rata-rata lama sekolah (RLS) tidak sesuai dengan target RPJMD.

Dinas Pendidikan yang diketuai oleh seorang Kepala Dinas bertugas untuk membantu seorang bupati. Berdasarkan pada Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo memiliki fungsi pokok:

1. Merumuskan kebijakan teknis pada bidang pendidikan
2. Menjalankan kebijakan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata
3. Mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan urusan pemerintahan pada bidang pendidikan
4. Melaksanakan administrasi dinas pendidikan
5. Melaksanakan penyelenggaraan tugas UPTD
6. Melaksanakan fungsi lainnya dari bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Problematika di Indonesia tercermin pada pelayanan pendidikannya. Fakta ini tergambar dari masih banyaknya saudara kita yang berada di pelosok/tempat yang sukar dijangkau mengalami pelayanan pendidikan yang tidak layak. Data dari susenas tahun 2020 (dalam unicef.org) memaparkan bahwa terdapat sejumlah 4,1 juta anak yang tidak sekolah.

Sarana dan prasarana adalah masalah lain dalam menghambat anak anak dalam menempuh pendidikan. Sarana pendidikan yang sudah rusak, termasuknya alat yang kurang untuk melakukan praktikum terutama di daerah pedesaan dan daerah yang terisolir. Hal ini menyebabkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia turun. Pada pendidikan dasar di Kabupaten Sukoharjo ditemukan beberapa permasalahan menurut renstra dinas pendidikan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (dalam Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo 2021), berupa:

1. Terjadi penurunan akan jumlah siswa sekolah dasar sehingga pemerintah memutuskan untuk melakukan penggabungan/*Regrouping*. Dalam kurun waktu

- 5 tahun kebelakang telah dilakukan penggabungan 28 Sekolah Dasar untuk mencapai efektifitas dan efisiensi
2. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang berjalan belum bisa optimal
 3. Terdapatnya sekolah dasar yang harusnya sudah memiliki perpustakaan sendiri ternyata belum memiliki perpustakaan
 4. Terdapatnya SMP yang tidak memiliki Lab Komputer dan Lab Bahasa sendiri dimana seharusnya punya. Tidak terjadi pemerataan atas tenaga pustakawan dan tenaga laboran guna mendukung kualitas pembelajaran yang baik
 5. Kebijakan pemerintah berupa meniadakan pungutan liar/pungli dari pihak sekolah pada jenjang pendidikan dasar menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah untuk mendukung dan menjamin kepastian masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang bebas dari pungutan namun juga memiliki kualitas pendidikan yang baik.

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi yang melekat pada dinas pendidikan Kabupaten Sukoharjo dan masalah-masalah yang masih banyak ditemukan di pelayanan pendidikan dasar maka peneliti ingin meneliti pelayanan pendidikan dasar yang diberikan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sukoharjo melalui kegiatannya yang dijalankan lewat tugas dan fungsi pokok. Kondisi *real* yang diharapkan bisa sejalan dengan amanat UUD 1945, di sekolah dasar, pendidikan diharapkan bisa membuat cerdas dan membentuk kehidupan bangsa yang memiliki takwa, memiliki cinta dan memiliki kebanggaan terhadap Negara.

Metode

Penelitian ini mengambil tempat penelitian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sukoharjo dengan alasan, lokasi itu masih terdapat banyak permasalahan seperti, penggabungan 28 SD, pelaksanaan MBS belum optimal, dan kurangnya sarana prasarana sekolah. Peneliti menggunakan penelitian berjenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan pendapat Bogdan dan Taylor (dalam Grace, M 2012) metode kualitatif dijelaskan sebagai prosedur penelitian yang hasilnya adalah data deskriptif. Data deskriptif itu meliputi kata yang tertulis, lisan dari manusia, dan perilaku yang bisa diamati. Metode ini dipakai dalam rangka meneliti keadaan objek secara alamiah.

Peneliti memakai strategi penelitian studi kasus. Pemilihan studi kasus dikarenakan saya ingin secara intensif mempelajari kinerja dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sukoharjo sebagai evaluasi terhadap manajemen pelayanan pendidikan dasar. Alasan peneliti sesuai dengan pendapat dari Arikunto (2006, dalam Grace, M 2012). Arikunto (2006, dalam Grace, M 2012) menjelaskan studi kasus sebagai penelitian yang dikerjakan dengan intensif terperinci dan mendalam pada organisasi, lembaga atau gejala tertentu.

Penelitian kualitatif tidak memakai sampel dan populasi sebagai sumber informasi penelitian namun yang dipakai di dalam penelitian kualitatif adalah informan. Peneliti dalam penelitian ini akan menggunakan informan, sebagai berikut :

1. Kepala bidang pembinaan SD
2. Kepala bidang pembinaan SMP
3. Sub bagian umum dan kepegawaian

Menurut pendapat Sugiyono (2016, dalam Nuraeni, I 2020) data bisa dikelompokkan menjadi 2 berdasarkan sumbernya. Peneliti memakai data dari wawancara sebagai data primer. Data sekundernya, peneliti pribadi akan menggunakan artikel, literatur berita, jurnal, dan situs yang tersedia di internet lainnya yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan.

Penulis pada penelitian ini memakai teknik-teknik pengumpulan data dalam upaya memperoleh informasi yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data itu adalah:

1. Wawancara

Menurut Afifudin dan Ahmad (2009, dalam Grace, M 2012) wawancara dipahami metode pengambilan data yang dilakukan melalui bertanya kepada seseorang yang berposisi sebagai responden atau informan. Dalam pelaksanaannya peneliti membutuhkan instrument pengumpul data yang disebut pedoman wawancara untuk memudahkan dalam penggalian informasi yang sedalam-dalamnya. Saat praktik wawancara berlangsung, pertanyaan perlu disesuaikan dengan konteks aktual atau terkini. Wawancara dari penelitian ini bertujuan agar dapat diketahui dan dapat menjelaskan kinerja dari dinas Kabupaten Sukoharjo sebagai evaluasi terhadap manajemen pelayanan pendidikan dasar.

2. Studi Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006, dalam Grace, M 2012) menyatakan bahwa ketika mengerjakan pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat, catatan harian dan lain-lain. Suatu dokumen dan catatan mempunyai peranan sebagai bentuk pertanggung jawaban atau dan untuk menjadi saksi atas kejadian-kejadian tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti membaca, menelaah, dan mengkaji dokumen yang memiliki relevansi dengan masalah penelitian, misalnya dokumen renstra dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026, Peraturan Bupati Sukoharjo nomor 50 tahun 2016, dan lain-lain.

Peneliti di dalam menguji keabsahan data atau kevalidan data, menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik triangulasi sumber dijelaskan melalui pendapat Denzin, N.K. (dalam Rahardjo, M 2010) sebagai kegiatan untuk memperoleh informasi melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Dalam penelitian ini, triangulasi sumber dilakukan melalui wawancara dan dokumen serta melakukan konfirmasi jawaban dengan responde lain terhadap pertanyaan wawancara yang sama. Dalam

perihal dokumen, penelitian ini menggunakan dokumen renstra dan rapor kabupaten Sukoharjo 2004.

Peneliti memakai teknik analisis data interaktif berdasarkan pada pendapat Miler & Huberman (dalam Grace, M 2012) sesuai dengan pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Miler & Huberman (dalam Grace, M 2012) teknis analisis data iteraktif didefinisikan sebagai tiga kegiatan yang dilakukan secara bersamaan berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Evaluation performance adalah kegiatan yang dapat dikatakan penting sebab dengan adanya penilaian kinerja, organisasi dapat diukur keberhasilannya dalam pencapaian misi organisasi. Penilaian atas kinerja dilakukan juga memiliki maksud agar kinerja dapat diperbaiki sehingga kinerja dapat terarah dan sistematis. Kajian tentang kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi yang ada, mempunyai nilai strategis, yang memiliki arti informasi terkait kinerja organisasi dinas pendidikan kabupaten Sukoharjo *urgent* untuk diketahui. Ketika akan melakukan *evaluation* atas kinerja dari organisasi, dibutuhkan suatu indikator. Indikator yang saya gunakan adalah berdasarkan pada teori lenvine (1990). Berikut penilaian kerjanya :

a. **Responsibilitas**

Responsibilitas mengandung pengertian sebuah konsep yang diukur lewat melaksanakan kegiatan organisasi dan pemberian pelayanan publik oleh organisasi. Ketika melakukan hal-hal diatas apakah sudah sesuai dengan prinsip administrasi, peraturan dan kebijakan organisasi. Prinsip-prinsip administrasi bisa dijelaskan sebagai konsep menjadikan tujuan organisasi atau tujuan pelayanan menjadi perhatian khusus bukan malah berpaku pada kakunya birokrasi atau berbelit-belitnya birokrasi. Dinas pendidikan dan kabupaten Sukoharjo dalam hal ini telah melakukan pemberian pelayanan sesuai prinsip administrasi karena telah memprioritaskan tujuan pelayanan. Secara peraturan dan kebijakan organisasi, dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sukoharjo juga telah melakukan kegiatan organisasi dan pemberian pelayanan yang sesuai misalnya melakukan perubahan dibidang kurikulum SMP mengikuti perubahan kebijakan pusat, perubahan itu meliputi pembaharuan keilmuan dan segala teknisnya di bidang kurikulum. Pelayanan publik yang kemudian terjadi, akan sesuai dengan yang seharusnya, tidak asal-asalan. Baik pelayanan dalam bentuk sosialisasi, pelatihan kepada guru-guru dan kepala sekolah, dan dalam bentuk yang lainnya.

Responsibilitas bisa juga diterjemahkan ke dalam konsep lain. Birokrasi publik dikatakan *responsible* jika pelakunya mempunyai standar profesionalisme atau mempunyai kompetensi teknis yang tinggi. Dinas pendidikan dapat dikatakan *responsibel* karena terdapat pelatihan bagi birokrat agar bisa melakukan kinerja dengan baik. Penilaian ini berdasarkan dengan wawancara bersama kepala seksi kurikulum.

Pelatihan dan pengembangan profesional bisa menjadi sarana meningkatkan kualitas SDM birokrasi sehingga dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai. Disamping pelatihan dan pengembangan professional, secara tingkat pendidikan dinas pendidikan dinilai sudah cukup baik dengan susunan keanggotaan terdiri dari jenjang pendidikan S1 sebanyak 58,51% dan jenjang S2 sebanyak 20,74%. Data tentang jumlah pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo menurut tingkat pendidikan dapat dilihat di renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026.

Standar profesionalisme tidak hanya telah dimiliki dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sukoharjo namun pihak dinas juga berupaya membangun standar profesionalitas kepada sekolah-sekolah di Kabupaten Sukoharjo lewat guru-gurunya. Dijelaskan dalam wawancara dengan kepala bidang pembina SD bahwa terdapat pelatihan pada para guru yang menjadi perwakilan tiap kecamatan di Kabupaten Sukoharjo yang nantinya perwakilan tersebut wajib mendiseminasikan hasil pelatihan ke kecamatannya masing-masing sehingga bisa sesuai dengan anggaran dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dan bisa lebih efektif dalam pelaksanaannya. Mengingat jumlah peserta yang terlalu banyak akan menjadi variable yang menghambat proses transfer keilmuan, pengetahuan dalam pelatihan. Jadi dengan jumlah peserta yang lebih sedikit akan lebih efektif karena memudahkan peserta untuk bisa fokus dalam menangkap hal-hal yang penting dalam pelatihan.

Birokrasi dalam kaitannya dengan responsibilitas perlu menghindari konsep yang menyatakan bahwa masyarakatlah yang berposisi sebagai pihak yang membutuhkan membutuhkan bantuan birokrasi. Konsep yang dimaksud tersebut menganggap bahwa masyarakat akan selalu patuh menerima setiap kebijakan, program dan lain-lain dari birokrasi meskipun tidak berdampak baik. Hal inilah yang dapat menyebabkan birokrasi enggan menerima kritikan/keluhan dari masyarakat untuk pembenahan.

Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dalam melakukan tugas dan fungsinya berdasarkan indikator responsibilitas dinilai baik. Dalam pengertian sesuai dengan prinsip administrasi, peraturan dan kebijakan organisasi. Dalam standar profesionalnya juga telah berjalan sebagaimana semestinya.

b. Responsivitas

Responsivitas birokrasi atas kebutuhan dan aspirasi masyarakat dijelaskan sebagai bentuk pelaksanaan fungsi birokrasi atas kedudukannya sebagai pelaksana kegiatan pembangunan dan pelayanan dalam rangka masyarakat yang sejahtera. Dalam hal ini birokrasi memberikan tanggapan dan menyediakan layanan dengan tujuan menolong masyarakat dalam bentuk pelayanan. Responsivitas yang baik menunjukkan bahwa terdapat keselarasan antara kegiatan pelayanan dan program dengan kebutuhan dan aspirasi yang dimiliki masyarakat. Responsivitas menjadi sangat dibutuhkan dalam

pemberian pelayanan publik sebab hal itu adalah bukti organisasi dikatakan mampu mengetahui kebutuhan masyarakat.

Responsiveness dijadikan sebagai salah satu indikator pelayanan kaitannya dengan daya tanggap birokrasi atas kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan publik, seperti yang telah diatur di dalam perundang-undangan. Responsivitas sendiri berarti selarasnya program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat yang ada. Responsivitas dijadikan menjadi salah satu indikator kinerja, sebab responsivitas mencerminkan kemampuan yang dimiliki birokrasi dalam menjalankan misi dan tujuannya, utamanya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Responsiveness dalam indikator kinerja yang peneliti gunakan pertama, dapat diterjemahkan sebagai kemampuan yang dimiliki organisasi dalam mengetahui kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Birokrasi ketika melakukan pemberian pelayanan publik yang baik perlu mengenali kebutuhan masyarakat. Mengetahuinya kebutuhan masyarakat dibutuhkan untuk dapat dijadikan modal pengembangan pemberian pelayanan publik yang lebih baik sehingga masyarakat selaku penerima pelayanan merasa puas. Berdasarkan pada wawancara dengan kepala bidang pembinaan SD, mengenalinya kebutuhan dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Sukoharjo terhadap kebutuhan masyarakat atau dalam hal ini adalah sekolah-sekolah SD dan SMP termasuk yang sederajat seperti MI, MTS di Kabupaten Sukoharjo, dilakukan melalui pelayanan pengaduan secara langsung bagi sekolah-sekolah yang ingin langsung datang ke dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sukoharjo untuk mengurus keperluannya.

Responsivitas dari pengertian pertama terkonfirmasi dengan jawaban lain yaitu dengan kepala seksi kurikulum bidang pembinaan SMP. Wawancara tersebut menjelaskan bahwa dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sukoharjo juga melakukan pengenalan kebutuhan dan aspirasi masyarakat atau sekolah-sekolah SD dan SMP dengan melalui pendataan-pendataan terhadap sekolah-sekolah tersebut. Ditemukan masih banyak terdapat sekolah-sekolah dengan sarana prasarana yang kurang baik. Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sukoharjo beralasan bahwa perbaikan sarana prasarana bergantung pada anggaran yang tersedia. Membahas hal itu, berarti ada yang didahulukan terlebih dahulu dalam pemberian pelayanan publik dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sukoharjo ke sekolah-sekolah SD dan SMP di Kabupaten Sukoharjo. Berikut data sarana prasarana sebagai bukti dalam mendukung pernyataan peneliti:

Tabel 1.

Data sarana dan prasarana SD dan SMP di Kabupaten Sukoharjo

No	Jenis	Ruang kelas rusak ringan
1.	SD Negeri Bentakan 01	6
2.	SD Negeri 01 Lengking	6
3.	SD Negeri Ngasinan 04	0
4.	SD Negeri Mancasan 04	4
5.	SMP Negeri 3 Bulu	2

Sumber: Database Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo

Responsivitas, kedua, dapat diterjemahkan sebagai kemampuan yang dimiliki organisasi dalam penyusunan agenda, prioritas pelayanan dan pengembangan program pelayanan publik. Pemrioritasan pelayanan diperlukan karena tidak semua dapat terlayani dalam waktu berdekatan. Hal-hal seperti keterbatasan sumber daya dan waktu menjadi sebab di lakukannya pemrioritasan pelayanan. Pelayanan yang terprioritaskan dengan baik adalah pelayanan yang rasional tidak berdasarkan sentiment atau kepentingan pribadi karena kedekatan dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi kurikulum SMP, dicontohkan bahwa penentuan prioritas dilakukan ketika ada bangunan sekolah yang mempunyai potensi membahayakan, maka diprioritaskan untuk diperbaiki dahulu.

Penentuan prioritas pelayanan dan pengembangan program pelayanan publik tergambar juga dari jawaban lain yaitu dengan kepala bidang pembinaan SD. Wawancara tersebut menjelaskan bahwa salah satu program pelayanan publik pendidikan dasar adalah pelaksanaan lomba-lomba dalam rangka mewadahi bakat dan minat para siswa. Lomba tersebut dapat dibedakan kedalam dua jenis lomba berjenjang dari tingkat kabupaten sampai internasional/nasional/provinsi dan lomba yang tidak berjenjang. Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dengan anggaran yang terbatas memilih untuk memprioritaskan pelaksanaan lomba berjenjang. Pemrioritasan tersebut dirasa sudah tepat selain untuk memperkenalkan nama kabupaten juga bisa mendukung siswa-siswinya untuk berada dalam lingkungan yang lebih kompetitif sehingga baik kemampuan dan mental lebih terasah.

Kabupaten Sukoharjo adalah kabupaten yang memberlakukan peraturan dimana sekolah-sekolah negeri baik SD dan SMP tidak diperbolehkan untuk melakukan pungutan jenis apapun. Pungutan yang dilakukan oleh sekolah-sekolah biasanya dilakukan untuk kegiatan operasional mereka. Pemerintah pusat harus memikul beban sebagai akibat tidak adanya pungli dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sekolah. Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sukoharjo sendiri dalam keberjalanannya, mengandalkan anggaran dari sumber-sumber seperti pusat, dana alokasi khusus, dari dana provinsi, dan dana dari kabupaten. Adanya pemrioritasan pelayanan yang dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sukoharjo kerjakan dirasa sudah tepat mengingat adanya keterbatasan anggaran dan sasaran pemrioritasannya tepat. Jadi dalam indikator responsivitas, dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sukoharjo terbilang baik.

c. Akuntabilitas

Akuntabilitas menjadi salah satu indikator karena sifatnya yang penting dalam rangka terciptanya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Adanya akuntabilitas berarti adanya pertanggungjawaban lembaga publik atas semua kegiatan yang dilakukan kepada rakyat. Dalam birokrasi, akuntabilitas terjadi tidak hanya bersandar pada kontrol structural atau pengawasan luar seperti dari inspektorat namun ada juga *inner control*. *Inner control* adalah kontrol diri sendiri seperti contohnya rasa tanggung jawab para pejabat publik. Sehingga akuntabilitas birokrasi yang terjadi berupa pertanggungjawaban baik secara langsung dan tidak langsung atas pelayanan dari pemerintah.

Pertama dalam indikator kinerja peneliti, akuntabilitas diterjemahkan sebagai kebijakan dan kegiatan organisasi publik yang berpihak pada kepentingan yang dimiliki masyarakat. Berpihaknya pada kepentingan masyarakat dirasa penting karena kebutuhan masyarakat wajib diakomodir dan berusaha dipenuhi oleh pemerintah. Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dalam hal ini sudah dikatakan akuntabel. Dilihat dari adanya pelayanan publik khususnya berupa intervensi kepada sekolah-sekolah yang mendapatkan penilaian buruk di *assessment* nasional. Berikut adalah data raport pendidikan tahun 2024 untuk sekolah-sekolah yang mendapat intervensi dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sukoharjo karena raport kurang/merah:

Tabel 2.
Raport pendidikan sekolah SD dan SMP di Sukoharjo

No.	Jenis	Kemampuan Numerasi
1.	SD Negeri Krajan	Kurang
2.	SD Negeri Sugihan	Kurang
3.	SD Negeri Menuran	Kurang
4.	SMP Islam	Kurang
5.	SD Negeri Bugel 01	Kurang

Sumber: Database dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sukoharjo

Kedua, akuntabilitas juga dapat diterjemahkan sebagai kewajiban dari organisasi dalam mempertanggungjawabkan kinerja dan tindakan organisasi kepada pihak yang mempunyai hak atau kewenangan untuk mendapatkan keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dapat dipahami lewat pernyataan tersebut berdasarkan wawancara dengan kepala seksi kurikulum.

Wawancara lain menambahkan bahwa akuntabilitas kinerja dilakukan berdasarkan hierarki dalam struktur organisasi. Bagian dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sukoharjo yang menangani pelayanan pendidikan dasar dalam hal ini adalah bidang pembinaan SD dan bidang pembinaan SMP, menjalankan akuntabilitas kinerja secara hierarki organisasi. Masing-masing bertanggung jawab atas kinerjanya kepada kepala Dinas. Secara keseluruhan dinas pendidikan dan kebudayaan bertanggung jawab kepada kepala daerah sejalan dengan visi dan misi yang terdapat di dalam rencana strategis.

Birokrasi pemerintah termasuk didalamnya dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dibentuk dengan tujuan untuk mengemban tugas dan tanggungjawab tertentu beserta suatu kewenangan atau mandat yang dilekatkan untuknya dalam rangka pelaksanaan tugas itu. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut diperlukan adanya akuntabilitas yang baik. Akuntabilitas tersebut seperti akuntabilitas yang memadai, memadai, tertib, dan teratur. Birokrasi pemerintah juga diharapkan bisa membantu pimpinan tertinggi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan mandate yang telah dipercayakan oleh masyarakat kepadanya. Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dalam hal ini, sejalan dengan itu, dalam visinya sudah terpampang dengan jelas bahwa komitmen dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sukoharjo adalah untuk membantu mewujudkan masyarakat yang lebih makmur yang merupakan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Sukoharjo. Penilaian dalam indikator akuntabilitas, dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dirasa sudah baik.

Penutup

Dari penelitian yang telah dijalankan ini, peneliti mengambil kesimpulan bahwa kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo sudah baik. Indikator-indikator kinerja yang peneliti pakai sehingga menunjukkan hasil seperti diatas, adalah sebagai berikut:

1. Responsibilitas, terlihat dari pelaksanaan kegiatan dan pemberian layanan dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sukoharjo telah sesuai dengan prinsip administrasi dan kebijakan organisasi serta telah memiliki memiliki standar profesionalisme.
2. Responsivitas, terlihat dari Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sukoharjo yang mengetahui kebutuhan pelayanan SMP dan SD di Kabupaten Sukoharjo serta mampu untuk penyusunan agenda, prioritas pelayanan dan pengembangan program pelayanan publik.
3. Akuntabilitas, terlihat dari keberpihakan dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sukoharjo pada kepentingan masyarakat dan pemenuhan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan kinerja dan tindakan organisasi kepada pihak yang mempunyai hak atau kewenangan untuk mendapatkan keterangan atau pertanggungjawaban.

Saran

Didasarkan hasil penelitian yang ada, maka berikut peneliti menyusun beberapa saran yang dapat dilakukan guna meningkatkan kinerja dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sukoharjo:

1. Dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten sukoharjo di bidang sd dan smp supaya meningkatkan prioritas pelayanan dan pengembangan program layanan publik kepada sekolah-sekolah di jenjang pendidikan dasar yang mendapatkan penilaian buruk saat assesment nasional.
2. Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupeten Sukoharjo dapat melakukan monitoring kepada sekolah-sekolah tanpa perlu menunggu pertemuan rutin atau keluhan muncul.
3. Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dapat mengadakan pelatihan rutin bagi para pegawai tanpa menunggu adanya perubahan seperti berubahnya kurikulum.

Referensi

- Almaushofia, N. (2023, 7 9). *Pendidikan dan Pembangunan Manusia: Seberapa Penting bagi Pembangunan Negara?* Retrieved 3 15, 2024, from Kumparan: <https://kumparan.com/nafaalmaushofia/pendidikan-dan-pembangunan-manusia-seberapa-penting-bagi-pembangunan-negara-20julGLKjal/3>
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo. (2021). *Renstra OPD Th 2021-2026*. Retrieved 2 29, 2024, from Dikbud Sukoharjo: <https://dikbud.sukoharjokab.go.id/submenu-multi/renstra-opd-th-2021-2026-1>
- Febiyanti, S dan Kriswibowo, A. (2023). Evaluasi Electronic Government dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik. *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis*, 301-3012.
- Fikri, M dan Achmadi. (2019). Analisis Penilaian Kinerja Pelayanan Publik Studi Kasus Kantor Camat Sako Kota Palembang Tahun 2018 (Berdasarkan Pedoman Permenpan No.7 Tahun 2010). *Jurnal Ilmiah Bina Manajemen*, 42-51.
- Grace, M. (2012). Thesis PENGGUNAAN METODE BERCERITA DALAM MENINGKATKAN ASPEK PERKEMBANGAN ANAK USIA DINI : Studi Kasus Pada Kelas Balita Umur 3-5 Tahun Sekolah Minggu Gekari Kota Tanpa Tembok (GKTT) Cabang Kota Bandung.
- Juarisman, R; Tua, H; S, R.F and Yusri, A. (2020). Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 163-173.
- Nuraeni, I. (n.d.). Thesis Pengaruh Pengalaman Bisnis dan Lingkungan Keluarga Terhadap Minat Berwibawa Mahasiswa Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. 2020.
- Pratisia, N.E; Indarti, S; Dwi, Astri. (2020). Penerapan Responsibilitas dan Transparansi dalam Layanan Publik. *Jurnal Profesional FIS UNIVED*, 43-49.
- Rahadi, D. R. (2010). *Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.
- Rahardjo, M. (2010, 10 15). *Triangulasi dalam penelitian kualitatif*. Retrieved 06 26, 2024, from UIN Malang: <https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>
- Rahayu, A.Y.S; Rahmayanti, K.P; Mahendra, W; Syarien, M.I.A and Afra, S.A. (2020). Performance Evaluation of Public Service Mall (Mall Pelayanan Publik) in Indonesia using the Balanced Scorecard. *Public and Governance Review*, 123-140.
- Ristanto, A. D. (2018). Skripsi Studi Kinerja DPRD Kabupaten Pacitan dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Periode 2014-2019. Pacitan, Indonesia.
- Sugiarto, E. C. (2019, Juni 25). *Pembangunan SDM Menuju Indonesia Unggul*. Retrieved April 27, 2024, from Setneg: https://setneg.go.id/baca/index/pembangunan_sumber_daya_manusia_sdm_men_uju_indonesia_unggul
- Thabroni, G. (2022, 4 7). *Pendidikan: Pengertian, Unsur, Tujuan, Fungsi, dsb (Lengkap)*. Retrieved 2 29, 2024, from Pendidikan: <https://serupa.id/pendidikan-pengertian-unsur-tujuan-fungsi-dsb-lengkap/>
- Unicef. (2020, Maret 30). *Dengan 23 negara belum membuka kembali sekolah secara penuh, pendidikan berisiko menjadi 'pemisah terbesar', seiring pandemi*

- COVID-19 memasuki tahun ketiganya – UNICEF*. Retrieved Mei 09, 2024, from Unicef org: <https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/dengan-23-negara>
- Wicaksono, K.W and Ismail, H.H. (2013). PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP ADMINISTRASI DALAM BIROKRASI INDONESIA (Sebuah Telaah Kritis Terhadap Reformasi Birokrasi di Indonesia Berdasarkan Perspektif Prinsip-Prinsip Administrasi). *Jurnal Bina Praja*, 163-168.
- Widodo, J. (2001). *Good governance: telaah dari dimensi akuntabilitas dan kontrol birokrasi pada era desentralisasi dan otonomi daerah*. Surabaya: Insan Cendikia.
- Wiyanto, J. (2022). Thesis Manajemen Komite Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan di Sekolah Dasar Muhammadiyah Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022. Sukoharjo, Indonesia.
- Yarrow; Afkar, N. B; Masood, R; Gauthier, E dan Bernard. (2020). *Measuring the Quality of MoRA's Education Services*. Indonesia: World Bank.
- Yusuf, D. I. (2015). Skripsi VOTING BEHAVIOR OF ETHICAL SOCIETY AT LOCAL ELECTION (Study on Lampung Siwo Mego Buay Subing Ethnical at Labuhan Ratu Village Labuhan Ratu District of East Lampung Regency). Lampung.